



**STUDI ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. MENGENAI
PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS * 5-2011 101 AS	No. REG : 5-2011/AS/101 ASAL BUKU : TANGGAL :

OLEH:

**WIMAS HIJRAYANSYAH
NIM: C51207055**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

**SURABAYA
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Wimas Hijrayansyah

NIM : C51207055

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/ Ahwalus Syakhshiyah

Judul Skripsi : Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Juli 2011

Saya yang menyatakan,



Wimas Hijrayansyah
C51207055

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Wimas Hijrayansyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 9 Agustus 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua

Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Sekretaris


Imam Ibnu Hajar, M.Ag.
NIP. 196808062000031003


Penguji I,

Penguji I,

Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
NIP. 196506151991021001

Penguji II,

Muwahid, SH, M.Hum,
NIP. 197803102005011004

Pembimbing,


Drs. H. Sam'un M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Surabaya, 12 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

D. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.....	72
E. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.	74
BAB IV ANALISIS TERHADAP ALASAN DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG NO. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. DALAM PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH	78
A. Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah.....	78
B. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan semua makhluk-Nya berpasang-pasangan, tidak terkecuali manusia. Hal ini dapat diketahui melalui firman-Nya di dalam al-Qur'an, surat 51, *az-Ẓariyat*, ayat 49, yang menyatakan "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah".¹ Kemudian Allah menjelaskannya khusus bagi manusia yang terdapat dalam al-Qur'an, surat 78, *an-Naba'*, ayat 8, yang berbunyi: "dan Kami jadikan kamu berpasang-pasangan".²

Berdasarkan keterangan dari kedua ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu secara berpasangan. Contohnya, ada langit maka ada bumi, ada siang ada malam, ada kanan ada kiri, ada baik ada buruk, begitu pula manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Tujuan dari adanya saling berpasangan ini adalah sebagai pengingat akan kebesaran Allah.

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Madinah: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2005), 862

² *Ibid.*, 1014

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 36

kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.⁵

Pengertian perkawinan dalam hukum Islam dengan pengertian perkawinan yang ada dalam Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 pada dasarnya tidak terdapat perbedaan prinsipil sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 Tahun 1974 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Rumusan Pasal 1 UU Nomor. 1 Tahun 1974 mengandung beberapa hal, yaitu *pertama*: digunakannya kata “seorang pria dengan seorang wanita”, mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang saat ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. *Kedua*: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri”, mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*: dalam rumusan tersebut juga disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press 1999), 14

⁶ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Media Wacana, 2008), 8

1. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974)
2. Mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Demi terciptanya semua tujuan perkawinan yang telah disebutkan di atas maka perkawinan itu haruslah sah menurut hukum agama dan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam akad pernikahan harus terpenuhi rukun dan syarat nikah menurut *fiqh munākahāt*, yang diantaranya rukun perkawinan itu harus terpenuhi 5 unsur, yaitu adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul.¹⁴ Apabila 5 rukun ini sudah ada dan masing-masing rukun itu telah memenuhi persyaratannya, maka perkawinan itu telah sah menurut hukum agama.

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa, “Perkawinan yang sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁵

Sedangkan sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah diharuskannya mencatatkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berada di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2

¹⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 46-47

¹⁵ Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan..., 8

ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁶

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 yang berbunyi, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.¹⁷ Serta Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.¹⁸ Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan Akta Nikah dan masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan di antara mereka atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.¹⁹

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*, 37

¹⁸ *Ibid.*, 431

¹⁹ Ahmad Muzaikhan, *Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah)*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang: 2006), 2-3

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah maka telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang melakukan nikah sirri sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat dalam buku register pencatatan nikah yang ada di Kantor Urusan Agama. Mereka beranggapan bahwa biaya untuk melangsungkan perkawinan yang dicatatkan cukup besar. Sah menurut agama sudah cukup sebagai sahnya perkawinan tanpa perlu dicatatkan.

Padahal di antara akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah halalnya hubungan badan di antara pasangan suami istri dan kepastian hukum bagi keluarga.²⁰

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menerima pengajuan banding dari Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara permohonan isbat nikah dan perkara tersebut telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU Nomor. 4 Tahun 2004 yang menyatakan,

(1) Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas.

²⁰ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49-50

(2) Tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara secara perdamaian.²¹

Terbanding yang asalnya merupakan pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang pada pokoknya mohon ditetapkan keabsahan pernikahannya dengan istri terbanding yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002, di rumah Pemohon / Terbanding di Kabupaten Lumajang, wali nikah ayah kandung istri terbanding (pemanding), bertindak sebagai *munākiḥ* adalah Pembantu Penghulu / Kaur Kesra bernama saksi 1, dengan disaksikan oleh banyak orang di antaranya saksi 2, dan saksi 3, dengan mahar / maskawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.²² Pemohon merasa perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan merasa ragu dengan perkawinan yang telah dilangsungkan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Lumajang melalui putusannya mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan istri Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002, di Kabupaten Lumajang.

²¹ Umar Said, *Pemandu Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama*, (Surabaya: Cempaka, 2008), 21

²² Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan..., 431

Kemudian Pemohon/Terbanding menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan kesaksian saling bersesuaian bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding dilaksanakan pada tahun 2002, di rumah Pemohon / Terbanding, dihadiri oleh Termohon/Pembanding serta ada *tawki*/ wali dari Termohon/Pembanding kepada Saksi Satu (saksi 1, Kaur kesra yang jadi Munakih) dan ada ijab qabul serta mahar/maskawin seperangkat alat shalat tunai, dan bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding tahun 2002 tersebut adalah merupakan *tajdidun nikah* (pembaharuan

Kemudian Pemohon/Terbanding menghadirkan tiga orang saksi yang memberikan kesaksian saling bersesuaian bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding dilaksanakan pada tahun 2002, di rumah Pemohon / Terbanding, dihadiri oleh Termohon/Pembanding serta ada *tawki* wali dari Termohon/Pembanding kepada Saksi Satu (saksi 1, Kaur kesra yang jadi Munakih) dan ada ijab qabul serta mahar/maskawin seperangkat alat shalat tunai, dan bahwa pernikahan Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding tahun 2002 tersebut adalah merupakan *tajdidun nikah* (pembaharuan

nikah) karena Pemohon/Terbanding meragukan terhadap pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon/Terbanding dengan istri Terbanding sebelumnya.

Terhadap kesaksian para saksi tersebut, Termohon/Pembanding memberikan tanggapan bahwa pada waktu itu bukan *tajaddud (tajdidun nikāh)* tapi anak Termohon/Pembanding mengatakan ada acara tasyakuran ulang tahun dan bahwa pada saat Pak Modin (Saksi 1) akan mengadakan anak Termohon/Pembanding, Termohon/Pembanding tidak menyatakan pasrah (*tawkiʻl wali*) tetapi Termohon/Pembanding hanya bilang “Terserah Pak Modin”, dan acara tersebut terjadi bukan tahun 2002.

Untuk mengajukan permohonan isbat nikah harus diuraikan dengan jelas hal-hal yang melatarbelakangi permohonan pengesahan nikah tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a) sampai huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b) Hilangnya akta nikah
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor. 1 Tahun 1974
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor. 1 Tahun 1974²³

²³ *Ibid.*

Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut. Penulis mengangkat tema ini dengan judul, **Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.**

Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah penelitian ini berupa:

1. Adanya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Lumajang.
2. Adanya keraguan pemohon sehingga mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Lumajang.
3. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang setelah adanya pengajuan banding oleh wali nikah, ayah kandung istri pemohon.
4. Adanya perbedaan pertimbangan hukum di antara dua Pengadilan, yaitu Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini membatasi masalah, yakni:

1. Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

IAIN Sunan Ampel, terdapat beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini, di antaranya:

1. Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.) yang ditulis oleh Saudara Hidayatullah. Skripsi ini menjelaskan tentang tata cara beracara (hukum formil) pengajuan permohonan isbat nikah kedua. Proses pengajuan isbat nikah kedua di Pengadilan Agama Lumajang dilakukan sebagaimana prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Agama seperti perkara lain, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.²⁴
2. Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA (Studi Penetapan Nomor. 178/Pdt.P/2008/PA.Sby.) yang ditulis oleh saudari Umy Kulsum. Penulis menjelaskan bahwa pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka pengesahan perkawinan, pemohon pernah memiliki akta nikah namun setelah di cek di Kantor Urusan Agama (KUA) ternyata akta nikah tidak tercatat dalam buku register Kantor Urusan Agama (KUA). Dasar hukum hakim menolak isbat nikah pemohon karena tidak ada penunjukkan wali hakim

²⁴ Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, (Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya: 2010)

tetapi, perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Objek penelitian penulis berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara isbat nikah. Perbedaan tersebut sangat jelas terlihat karena pada penelitian sebelumnya belum ada yang meneliti putusan mengenai isbat nikah dari Pengadilan Tinggi Agama, semua hanya berasal dari putusan Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penelitian tentang pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara isbat nikah secara khusus belum pernah dikerjakan oleh Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian tersebut.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.
2. Untuk mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.

2. Aspek terapan (praktis), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para hakim dalam memutus suatu perkara terutama perkara isbat nikah dan bagi mahasiswa Hukum Islam dapat menerapkannya dalam profesinya sebagai hakim maupun praktisi hukum lainnya.

G. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari subjudul sebagai berikut:

Isbat nikah

Suatu upaya untuk mengesahkan perkawinan di antara sepasang suami-istri melalui Pengadilan Agama guna dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah di dalam Akta Nikah.

Pembatalan putusan	Amar putusan dari pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi terhadap putusan pengadilan yang ada di bawahnya dalam upaya hukum banding atau pun kasasi jika terdapat perbedaan pertimbangan hukum di antara keduanya.
--------------------	---

Sedangkan maksud dari judul skripsi Studi Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Mengenai Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah ini adalah penelitian putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dalam perkara pengesahan perkawinan di antara sepasang suami istri guna dicatatkan perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah di dalam Akta Nikah.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi menghasilkan kualitas pengetahuan mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara permohonan isbat nikah,

penulis perlu untuk mengemukakan metode penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang akan dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. dalam perkara permohonan isbat nikah, maka data yang dikumpulkan berupa:

- 1) Data tentang berkas perkara Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj..
- 2) Data tentang berkas perkara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby..
- 3) Data berupa keterangan majelis hakim dan panitera Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
- 4) Data tentang ketentuan isbat nikah dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.²⁷ Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13 (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 129

- 1) Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 2) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*.
- 3) Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Islam: Sejarah Pemikiran dan Realita*.
- 4) Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*.
- 5) Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*.
- 6) Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.
- 7) Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*.
- 8) Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*.
- 9) Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*.
- 10) Ibnu Rusyd al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*.
- 11) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 12) Kompilasi Hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian pustaka ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui studi dokumen atau telaah pustaka, yakni menghimpun data melalui data tertulis dengan menggunakan konten analisis.³⁰ Melalui

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 21

dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Dengan demikian, data yang dihimpun dalam penelitian ini akan ditelusuri melalui buku-buku tentang Peradilan Agama, buku-buku tentang perkawinan Islam, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan catatan-catatan atau berkas perkara yang disimpan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Data ini dijadikan sebagai instrumen untuk memahami objek penelitian dalam bidang isbat nikah terutama dalam perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Lebih lanjut, data hasil telaah pustaka tersebut dianalisis dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama yang membatalkan putusan Pengadilan Agama.

Selain menggunakan teknik telaah pustaka, teknik pengumpulan data yang lain adalah dengan teknik wawancara. Penggunaan teknik ini sebagai pelengkap terkait dengan objek penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Tinggi Agama, sebab di dalamnya terdapat pertimbangan hukum majelis hakim yang menangani perkara tersebut. Alasan-alasan dari pertimbangan hakim tersebut hanya dapat diperoleh melalui wawancara terhadap hakim-hakim yang menangani perkara tersebut. Sehingga keterangan dari hasil wawancara dapat berkontribusi dalam upaya mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Konsep dasar adanya analisa data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data.³¹ Untuk memenuhi konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.³²

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³³

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar hukum Islam maupun peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya dalam hal isbat nikah. Selanjutnya konsep dasar itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pembatalan Putusan Agama Lumajang oleh Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara isbat nikah, dan akhirnya ditarik sebuah kesimpulan.

³¹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. 26, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 248

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172

³³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63

I. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini membutuhkan sistematika pembahasan agar lebih memudahkan dalam pemahaman serta penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan sistematika pembahasan penelitian ini menjadi lima bab. Masing-masing bab akan memuat sub-sub bab sebagai penguat pembahasannya. Secara umum, sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

Penulisan skripsi ini dibuka dengan bab pertama berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Setelah itu, pembahasan akan dilanjutkan dengan bab kedua yang memuat tentang landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai isbat nikah yang meliputi pengertian isbat nikah, dasar hukum isbat nikah, syarat-syarat isbat nikah, faktor yang menyebabkan isbat nikah, orang yang berhak mengajukan isbat nikah, dan proses beracara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama.

Selanjutnya, sistematika pembahasan akan dirangkaikan dengan bab ketiga yang merupakan data penelitian mengenai Pengadilan Agama Lumajang yang meliputi profil, kewenangan dan wilayah yurisdiksi, serta struktur organisasinya. Kemudian mengenai Pengadilan Tinggi Agama Surabaya meliputi wilayah yurisdiksi dan kewenangan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya, serta struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Selanjutnya deskripsi putusan tentang permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Lumajang Nomor.162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby., pertimbangan hukum hakim dan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj., dan pertimbangan hukum hakim dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby..

Pada bab berikutnya, yakni bab keempat, penulis akan menjelaskan analisis terhadap alasan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah, yang meliputi: 1). Analisis terhadap alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah dan 2). Analisis Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah.

Pada bagian terakhir, penelitian ini ditutup dengan bab kelima yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan pengertian nikah dengan cukup jelas, mencakup akad hingga akibat hukumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 2 dan Pasal 3 yang berbunyi:⁷

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mīṣāqan galīzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa nikah adalah suatu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah di mana di dalamnya mengandung ketentuan syara' tentang kebolehan melakukan hubungan seksual di antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pengertian istilah isbat nikah pun dapat lebih mudah dipahami dari penjabaran pengertian kata-kata yang ada di dalamnya. Sehingga dapat diperoleh suatu pengertian bahwa isbat nikah adalah suatu penetapan terhadap keabsahan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan

⁷ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., 2001, 14

Ayat (2) dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Ayat (3) isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian*
- b) Hilangnya akta nikah*
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan*
- d) Adanya pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, dan*
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.*

Ayat (4) yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

2. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974⁹

Pasal 2

Ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

⁹ Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 6 ayat (1): *pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terhadap halangan perkawinan menurut Undang-Undang.*

Ayat (1) sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 peraturan pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2) akta perkawinan yang telah ditandatangani kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

Ayat (3) dengan menandatangani akta perkawinan, maka perkawinan tercatat secara resmi.

Pasal 12: *akta perkawinan memuat:*

a) Nama, tempat tanggal lahir, agama, pekerjaan dan tempat kediaman suami/istri; apabila salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.

4) *Jika kantor yang dahulu mengeluarkan surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya pernikahan, talak atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.*

5. Pedoman Teknis dan Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2009¹²

- a) *Aturan pengesahan nikah/isbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.*
- b) *Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1946 Jis. Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2), (3), (4) Kompilasi Hukum Islam.*
- c) *Dalam Pasal 49 angka 22 penjelasan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya*

¹² Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan Nomor. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, 41

permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas dan konkret.

- 2) Proses permohonan isbat nikah yang diajukan oleh suami istri bersifat voluntair, produk hukumnya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka pihak suami dan istri bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengupayakan kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan suami atau istri yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan



- Secara garis besar, syarat-syarat isbat nikah adalah syarat-syarat perkawinan secara umum karena dalam isbat nikah hal yang kurang hanyalah pencatatan perkawinan tersebut oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama. Apabila semua persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka permohonan isbat nikah dapat dilanjutkan ke Pengadilan Agama guna mendapatkan pengesahan dan akta nikah dari KUA.

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 7 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.

- 3) *Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.*
- 4) *Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.*
- 5) *Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.*²⁰

Selain kelima hal tersebut di atas, pernikahannya tidak dapat diajukan pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa.

E. Orang Yang Berhak Mengajukan Isbat Nikah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang isbat nikah secara lengkap terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, itulah mengapa pasal-pasal *isbat nikāh* banyak terdapat dalam KHI. Tidak semua orang berhak untuk mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, hanya beberapa orang tertentu sajalah yang dapat mengajukannya.

Hal tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

*Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.*²¹

²⁰ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 15-16

²¹ *Ibid*, 16

²⁶ Umar Said, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 55

4. Suami-istri yang telah ditinggal mati oleh istrinya atau suaminya dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
5. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan isbat nikah diajukan secara voluntair. Produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut harus ditolak, maka permohonan dapat mengajukan kasasi.

BAB III

**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA NOMOR 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. YANG
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA LUMAJANG
NOMOR. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.**

A. Pengadilan Agama Lumajang

1. Profil Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang terletak di jalan Jend. A. Yani Nomor. 12 Kelurahan Tompokersan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, Telp. (0334) 881508. Fax (0334) 891395. Untuk membantu kelancaran proses surat-menyerut, Pengadilan Agama Lumajang memiliki dua alamat surat elektronik yaitu mail@palumajang.net dan pa.lumajang@gmail.com¹

Gedung/Kantor Pengadilan Agama Lumajang adalah milik negara, dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1976/1977 seluas ± 100 m², tahun anggaran 1997/1998 memperoleh perluasan seluas ± 75 m². Bangunan gedung kantor tersebut berdiri di atas tanah negara seluas 918 m² dengan sertifikat hak pakai atas nama Mahkamah Agung R.I. Cq. Pengadilan Agama Lumajang nomor sertifikat : 1292/1982 dan 4475/19.

¹ <http://www.palumajang.net/profil-instansi> (15 Juli 2011)

Pada tahun anggaran 2005 Gedung Kantor Pengadilan Agama Lumajang direnovasi gedung kantor dengan bangunan bertingkat seluas 441 m². sehingga luas gedung kantor Pengadilan Agama Lumajang seluruhnya seluas 616 m².

Pengadilan Agama Lumajang memiliki 2 ruang sidang, 1 unit telpon, Air PDAM dan Listrik PLN 16.500.000 VA.

Pengadilan Agama Lumajang adalah Pengadilan Agama klas I.A yang menerima perkara setiap tahunnya kurang lebih 3000 perkara, pada tahun 2009 perkara yang diterima sebanyak 2920 perkara sedangkan pada tahun 2010 perkara yang diterima sebanyak 3436 perkara. Perkara sebanyak tersebut di atas ditangani oleh 8 (delapan) Orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan Agama Lumajang. Sedangkan jumlah pegawai Pengadilan Agama Lumajang termasuk hakim sebanyak 33 Orang.

Pengadilan Agama Lumajang memiliki visi berupa Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, karena Pengadilan Agama termasuk ke dalam lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Selain itu, Pengadilan Agama Lumajang memiliki misi sebagai berikut:²

- 1) Pemberian rasa keadilan yang tepat dan jujur.
- 2) Pengadilan Agama yang mandiri dan independent dari campur tangan pihak lain.

² <http://www.palumajang.net/visi-misi> (15 Juli 2011)

- ## 2) Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Lumajang adalah kewenangan relatif yang berarti wilayah yurisdiksi atau

wilayah hukumnya. Wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang meliputi beberapa kecamatan yang ada di seluruh Kabupaten Lumajang.

Berikut wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang:⁴

Nomor.	Kecamatan	Kelurahan / Desa
1.	Lumajang	Tompokersan Rogotrunan Kepuharjo Citrodiwangsan Ditrotunan Jogoyudan Jogotrunan Boreng Blukon Labruk Lor Denok
2.	Sumbersuko	Grati Sentul Labrik Kidul Kebonsari Mojosari Purwonoso Petahunan Banjarwaru
3.	Sukodono	Kutorenon Dawuhan Lor Karangsari Sumberejo Urunggantung Selok Besuki Klanting Kebonagung Bondoyudo Selok Gondang

⁴ <http://www.palumajang.net/wilayah-yuridiksi> (15 Juli 2011)

12.	Randuagung	Randuagung Kalidilem Banyuputih Lor Buwek Ledoktempuro Pejarakan Tunjung Gedangmas Kalipenggung Ranuwurung Ranulogong Salak
13.	Kedungjajang	Kedungjajang Grobogan Krasak Umbul Pandansari Tempursari Curahpetung Wonorejo Bandaran Bence Sawaran Kulon
14.	Klakah	Klakah Mlawang Ranupakis Tegalcit Sruni Duren Tegalrandu Kudus Kebonan Sumberwringin Sawaran Lor Paparingan

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama mempunyai fungsi yang sangat penting guna mempertegas kedudukan dan wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian, dengan demikian kelancaran daripada proses pelaksanaan peradilan tidak mengalami hambatan-hambatan.

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara

Kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Agama Lumajang terdaftar dengan nomor perkara 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Sedangkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terdaftar dengan nomor perkara 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Perkara kompetensi absolut Pengadilan Agama Lumajang tentang perkara isbat nikah diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang, yaitu seorang hakim sebagai ketua majelis, dan dua orang hakim lainnya sebagai hakim anggota.

Status pemohon pada saat pernikahan tersebut adalah jejaka dalam usia 33 tahun sedangkan istri pemohon berstatus perawan dalam usia 32 tahun. Antara pemohon dengan istri pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian setelah menikah, pemohon dan istri pemohon bertempat tinggal di rumah pemohon hingga 30 Nopember 2007 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang berusia 16 tahun dan 13 tahun.

Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon dan istri pemohon dan selama itu pula pemohon dan istri pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai.

Namun, pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan permohon tersebut tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang. Oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lumajang, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus urusan kepegawaian dan warisan sekaligus sebagai dasar sahnya perkawinan Pemohon menurut undang-undang.

yang ditujukan kepada Bupati Lumajang, berikut lembaran disposisinya (T-7).

8) Foto Copy surat B. Kosiatur yang ditujukan kepada PT Taspen Persero di Malang (T-8).

9) Foto Copy Tanda Penerimaan Lamporan Nomor. Pol.
STPL/91/II/2010/POLRES, tentang penggunaan surat nikah palsu oleh sdr
Darno bin Jumali (T-9).

2. Deskripsi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Nomor.123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.⁹

D. Pertimbangan Hukum Hakim Dan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.¹⁰

¹⁰ Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.

Terhadap sangkalan Termohon yang merasa tidak pernah mewakilkan kepada modin Mahin untuk menikahkan anaknya dengan Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan bahwa sangkalan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti bahkan bertentangan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah mewakilkan kepada modin Mahin, dan setelah itu Termohon membenarkan keterangan saksi bahwa ia sering datang ke rumah Pemohon. Selain itu juga bertentangan dengan keterangan Termohon sendiri yang menyatakan bahwa anaknya pernah minta cerai kepada Pemohon, kalimat tersebut memberi arti bahwa anak Termohon adalah istri Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pada tanggal 7 September 2002 telah terjadi akad nikah antara Pemohon dengan Endah Ninik Rubiyanti, telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 - Pasal 10 UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 - Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Selain kedua ketentuan perundangan di atas, pertimbangan hukum hakim yang lain adalah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2) Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Darno, Spd bin Jumali) dengan Endah Ninik Rubiyanti binti M. Saturi yang dilaksanakan pada tanggal 7 September 2002 di Desa Samberejo Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kec. Sukodono Kab. Lumajang.
- 4) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki beberapa pertimbangan dalam memutus perkara Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.. Menurut Ketua Majelis Drs. H. Soedarsono, S.H., H.H. adanya perbedaan pertimbangan antara majelis hakim di Pengadilan Tinggi Agama dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang adalah merupakan

¹¹ Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.

perbedaan sudut pandang. Majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang melihat dari segi yang satu sedangkan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melihat dari segi yang lebih luas.

Beberapa pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya perkara yang dimohonkan dalam kasus ini. Hal ini dijelaskan oleh majelis hakim bahwa untuk mengajukan permohonan *isbāt nikaḥ* harus diuraikan dengan jelas hal-hal yang melatarbelakangi permohonan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974.¹²

Karena setelah diteliti ternyata tidak ada klausula yang menjelaskan mengapa sampai Pemohon/Terbanding mengajukan *isbāt nikāh* tersebut. Alasan yang cukup kuat berdasarkan keterangan-keterangan adalah *tajdidum nikāh* tetapi poin tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a)-huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya yang

¹² *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 15-16

dimintakan pengesahan nikah adalah pernikahan sebelum tahun 2002, tetapi ketika diminta untuk membuktikannya Pemohon/Terbanding tidak dapat membuktikan adanya pernikahan sebelum Tahun 2002 tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dapat diketemukan fakta hukum bahwa secara yuridis maupun administratif tidak ada pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan istri terbanding, baik yang dilaksanakan sebelum tahun 2002 maupun pada tahun 2002 itu sendiri.

2) Tidak adanya wali nikah. Disebutkan dalam tanggapan Termohon/Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon/Terbanding bahwa Termohon/Pembanding tidak menyatakan pasrah (*tawkil wali*) tetapi hanya bilang terserah Pak Modin. Menurut Ketua Majelis, ungkapan terserah seperti yang dikatakan oleh Termohon/Pembanding bukanlah pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam akad nikah. Ungkapan terserah menurutnya tidak sah dan tidak sempurna karena pernikahan merupakan akad yang sangat kuat sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam dengan sebutan *misâqan galîzan*. Sehingga Pak Modin tidak berhak untuk mewakilkan Termohon/Pembanding sebagai wali nikah dari anaknya. Selain itu Pak Modin hanya sebatas Pembantu Pegawai Pencatat

¹³ Soedarsono, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juli 2011

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP ALASAN DAN PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI AGAMA SURABAYA No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
MENGENAI PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
LUMAJANG NO. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. DALAM PERKARA
PERMOHONAN ISBAT NIKAH**

A. Analisis Terhadap Alasan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Lumajang Nomor. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. Dalam Perkara Permohonan Isbat Nikah

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang, sebagaimana diterangkan dalam bab III di atas. Perbedaan tersebut karena majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melihat dari sisi yang lain di mana majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang tidak melihatnya dari sisi tersebut. Hal ini terungkap melalui wawancara langsung dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara tersebut.

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding pada pokoknya adalah mohon disahkan pernikahannya dengan istri Pemohon/Terbanding. Pada persidangan yang berlangsung di tingkat pertama penulis berpandangan

Pengadilan Tinggi Agama. Karena belum merasa puas dengan putusan tingkat pertama di pengadilan tingkat pertama.²

Pada hakikatnya, kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili perkara perdata dalam tingkat banding adalah kewenangan memeriksa ulang kembali suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama sebagai peradilan tingkat pertama. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama adalah pemeriksaan secara keseluruhan perkara yang dimintakan banding tersebut. Putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Agama diteliti dan diperiksa ulang mulai dari awal sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dapat dilihat antara lain dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang mengesahkan bahwa seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya. Begitu juga putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1975 mengesahkan bahwa dalam peradilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi seharusnya memeriksa bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya.

Menurut M. Yahya Harahap, tujuan utama pemeriksaan tingkat banding adalah untuk mengoreksi dan mengeluarkan segala kesalahan dan kekeliruan dalam penetapan hukum, tata cara mengadili, meluruskan

² Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran dan Realita*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), 285.

penilaian fakta dan pembuktian. Jika sekiranya pengadilan tingkat banding berpendapat pemeriksaan sudah tepat menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang dan amar putusan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dalam perkara yang bersangkutan, maka pengadilan tingkat banding itu berwenang untuk menguatkan putusan tersebut dengan cara mengambil alih seluruh pertimbangan, dan putusan sebagai pertimbangan dan putusannya sendiri. Sebaliknya jika pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa perkara yang diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama terdapat kesalahan dalam penerapan hukum atau kekeliruan cara mengadilinya, maka pengadilan tingkat banding berwenang untuk membatalkannya dan mengadili sendiri dengan putusan yang dianggap benar sebagai koreksi terhadap putusan pengadilan tingkat pertama.³

Dalam perkara yang penulis analisis ini, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama Lumajang melakukan upaya hukum berupa banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dan mengadili sendiri yakni menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya.

³ *Ibid*, 287-288.

Menurut penulis, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menilai bahwa *tajdidun nikāh* tidak termasuk ke dalam alasan yang dapat dimohonkan pengesahan nikah, sebagaimana telah dijelaskan pada bab II bahwa pengesahan nikah hanya terbatas pada beberapa hal tertentu saja, adalah tepat karena terbukti pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pejabat resmi Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pak Modin hanyalah pembantu PPN yang kedudukannya bukan pejabat resmi

Kantor Urusan Agama sehingga tidak berhak melaksanakan pernikahan atas nama Pegawai Pencatat Nikah/KUA. Oleh karena itu, pernikahan yang dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.*⁴ Sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang dan menolak permohonan Pemohon/Terbanding seluruhnya adalah putusan yang tepat karena secara rukun dan syarat pernikahan dalam perkawinan tersebut tidak jelas, di mana wali nikah tidak pernah mewakilkan kepada siapa pun untuk menikahkan anaknya. Pernyataan terserah tidak dapat dijadikan dasar hukum karena akad *tawki* tersebut tidak sah, hal ini berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang menangani perkara tersebut.

⁴ *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 15

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian mengenai Analisis Terhadap Alasan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. dalam perkara permohonan isbat nikah di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. adalah karena tidak adanya perkara yang dimohonkan dalam permohonan isbat nikah tersebut dan tidak adanya wali nikah. Alasan yang pertama, karena majelis hakim berpandangan tidak ditemukannya perkawinan antara Pemohon/Terbanding dengan istri Pemohon/Terbanding, baik secara yuridis maupun administratif setelah meneliti keterangan-keterangan dari para saksi, alat-alat bukti surat, dan juga jawaban dari para pihak yang berperkara. Alasan yang kedua, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berbeda pandangan dengan majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang bahwa

suatu penyerahan berupa akad tidaklah sah apabila hanya berupa kepasrahan, karena hal tersebut mengandung keragu-raguan dalam diri pemberi kuasa/akad. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama Lumajang dapat dibatalkan.

2. Dasar putusan dan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara banding No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby. mengenai Pembatalan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj. adalah bahwa di dalam permohonan isbat nikah Pemohon tidak disebutkan secara tegas alasan yang melatarbelakangi pengajuan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama Lumajang. Melalui keterangan para saksi, majelis hakim menyimpulkan bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh Pemohon/Terbanding merupakan *tajdidun nikāh* atau pembaruan nikah. Sementara alasan pengajuan *isbat nikāh* hanya terbatas pada beberapa hal berikut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi tentang pengesahan nikah tersebut, maka pernikahan antara Pemohon/Terbanding dengan istri Pemohon/Terbanding tidak dapat disahkan.

B. Saran

1. Bagi calon pasangan yang akan menikah hendaknya lebih teliti ketika pernikahannya dihadiri oleh pejabat Kantor Urusan Agama. Pejabat yang hadir harus dipastikan bahwa dia adalah pejabat resmi Kantor Urusan Agama, seperti Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Ketua Kantor Urusan Agama. Karena apabila utusan dari Kantor Urusan Agama tersebut hanya sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah maka dapat dipastikan pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang bahwa pernikahan harus dilangsungkan di hadapan pejabat resmi Kantor Urusan Agama setempat.
2. Bagi para hakim, baik hakim Pengadilan Agama maupun hakim Pengadilan Tinggi Agama, hendaknya tidak terburu-buru dalam menyimpulkan suatu fakta hukum yang muncul dalam persidangan. Semua harus diteliti secara saksama agar menghasilkan putusan yang berkualitas dan dapat menyelesaikan perkara atau sengketa secara tuntas. Hal ini dilakukan demi menjaga kewibawaan Peradilan Agama di semua tingkatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004
- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progressif, 2007
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 1999
- Bisri, Cik Hasan, *Model Penelitian Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd, 2005
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, 2001
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia: Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang, UIN-Malang Press, 2009
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor, Kencana, 2003
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. 9, 2009
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995
- Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, Cet. 26, 2009
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005
- Rosyadi dan Hanafi, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta, Rineka Cipta, 1995
- Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, Terjemahan oleh Agus Salim, Jakarta, Pustaka Amani, 2002
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, juz. 2, Beirut, Dar El-Fikr, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Yogyakarta, Liberty, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2010

- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 13, Jakarta, Rineka Cipta, 2006
- Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Umar Said, *Pemandu Kuliah: Hukum Acara Peradilan Agama*, Surabaya, Cempaka, 2008
- Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Beirut, Dar al-Fikr, Cet. III, 1989
- Ahid Miftah, *Studi Analisa Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Demak Tentang Isbat Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Ahmad Muzaikhan, *Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Pasal 7 KHI Tentang Isbat Nikah)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Walisongo Semarang, 2006
- Hidayatullah, *Analisis Hukum Formil Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang Mengenai Isbat Nikah Kedua (Studi Putusan No. 0628/Pdt.G/2010/PA.Lmj.)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Umy Kulsum, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penolakan Isbat Nikah Karena Akta Nikah Tidak Tercatat Dalam Buku Register KUA (Studi Penetapan No. 178/Pdt.P/2008/PA.Sby.)*, Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010
- Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Media Wacana, 2008
- Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1975
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 48 Tahun 2009
- Salinan putusan Pengadilan Agama Lumajang No. 162/Pdt.G/2010/PA.Lmj.
- Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No. 123/Pdt.G/2010/PTA.Sby.
- Soedarsono, *Wawancara*, Surabaya, 6 Juli 2011
- <http://www.palumajang.net/profil-instansi>
- <http://www.palumajang.net/struktur-organisasi>

